



Kekerasan Terhadap Anak Marak

- Korban dan Pelaku Punya Hubungan Dekat
- Bukan Hanya Tanggung Jawab Satu Pihak

YOGYA, TRIBUN
 - Duka mendalam dirasakan Brigita Lina Wati, warga Tegalrejo, Yogyakarta, setelah kehilangan putri bungsunya, tiga pekan lalu. Ia tak menyangka putrinya menjadi korban kejahatan yang dilakukan tetangganya sendiri. Sempat tak ketahui kemana hilangnya, jasad korban ditemukan

Bisa guru dengan korban muridnya sendiri. Yang baru saja terjadi, pelaku merupakan tetangga korban. Bahkan, sudah mengenal sejak lama.

LIPUTAN KHUSUS

• ke halaman 11

Korban Kekerasan 2017

Fisik :	440 korban
Psikis :	468 korban
Seksual :	281 korban
Penelantaran :	234 korban
Usia 0-17 tahun :	414 korban
usia 18-25 tahun :	234 korban

* Sumber Data : Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

GRAFS/FALUZIA BAKHMAN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tingkat Laporan
----------	--------------	-------	-----------------

Kekerasan Terhadap Anak Marak

• Sambungan Hal 1

mengambang di Sungai Winongo, tak jauh dari rumahnya. Korban dirudapaksa oleh pria yang dikenalnya.

Berdasar identifikasi pihak kepolisian, ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan organ dalam jasad korban. Korban diduga sempat dipukul pada bagian kepala.

"Dibuang ke sungai dalam kondisi hidup hingga akhirnya tenggelam dan meninggal, karena dalam paru-paru korban ditemukan cairan dan pembuluh darah yang pecah," ujar Kapolres Kota Yogyakarta, Kombes Pol Armanah.

Kasus ini menambah rentas kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta. Misalnya sampai periode semester satu tahun ini (Januari-Juli 2018), kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP-2KB) Sleman menunjukkan, 83 dari 210 kasus terjadi kekerasan terhadap anak.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Maillmadi Nuraini menjelaskan, mayoritas kasus yang terjadi lebih ke kekerasan psikis. Selain itu, juga terdapat kekerasan fisik dan pelecehan.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Wredi Wyandani mengatakan, penyelesaian kasus kekerasan pada anak merupakan upaya yang dibutuhkan sinergi lintas sektoral.

Menurutnya, meski sudah ada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perempuan dan Anak, Kekes Drah Utami, upaya penyelesaian kasus dan pendampingan korban bukan hanya melalui satu pintu. Pihaknya turut menggandeng

instansi lain, semisal Dinas Kesehatan hingga Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan kepada korban.

"Dalam penyelesaian kasus dan pendampingan, kami sesuaikan kebutuhan korban. Misalnya, penanganan kesehatannya tentu akan menggandeng Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga tak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak," ungkapnya.

Pun demikian dengan penanganan kasus yang dilaporkan melalui lembaga lain non-pemerintah, ia menegaskan bukan berarti pihaknya lepas tangan terhadap kasus tersebut. Kendati demikian, penyelesaian kasus akan menjadi fokus lembaga yang mendapatkan laporan.

Namun apabila dalam perjalanannya, lembaga bersangkutan kesulitan menyelesaikan kasus, maka pihaknya siap setiap saat untuk menjadi rujukan. "Itulah kenapa masalah kekerasan pada anak harus ditangani sinergi. Masalah ini sangat kompleks, begitu juga latar belakangnya. Beberapa kali kami juga menerima rujukan dan lembaga lembaga yang menjadi mitra BPPM dan tergabung dalam FPKK DIY (Forum Perlindungan Korban Kekerasan)," paparnya.

Terkait anggaran penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak, Wredi mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp600 hingga Rp700 juta setiap tahunnya.

Fenomena gunung es

Kasus kekerasan yang berujung kematian pada anak di Kricak ini menggempar publik di Di Yogyakarta. Tak ada yang pernah menyangka kasus kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual bakal mencuat lagi.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) yang menangani tiga kasus kekerasan seksual pada anak hingga Oktober ini, termasuk kasus di Tegajrejo yang terbaru.

Ketua umum YLPA, Sari Murti Widayastuti mengi-

baratkan, kasus kekerasan seksual pada anak ibarat fenomena gunung es.

Sebab, kasus semacam ini tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Terlebih, kebanyakan kasus yang muncul, antara korban dan pelaku memiliki hubungan dekat atau lebih dahulu saling mengenal.

"Bisa guru dengan korban muridnya sendiri. Yang baru saja terjadi, pelaku merupakan tetangga korban. Bahkan, sudah mengenal sejak lama," ungkapnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) ini menyayangkan, bahwa kasus semacam ini tak seharusnya terjadi, ketika peran aktif masyarakat yang dilandasi atas dasar kearifan lokal terus dikaitkan. Dalam penanganan kasus ini dibutuhkan kehadiran negara untuk ikut andil dalam masalah ini.

"Bukan berarti semuanya harus ditangani negara, dalam hal ini institusi dan lembaga pemerintahan. Namun lebih ke arah ikut peduli, bisa dilakukan dengan membangun sistem terpadu hingga menjangkau level pemerintahan paling bawah: desa/kecamatan dan diteruskan hingga tingkat RT/RW," paparnya.

Diterangkan, ketika ada sorang anak yatim ditinggalkan, sedangkan ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, menurut Sari, seharusnya ada peran aktif masyarakat untuk ikut peduli.

Menurutnya, dengan adanya orang tua tunggal, fungsi di keluarga korban tak berjalan sebagaimana mestinya. Di sinilah dibutuhkan peran serta masyarakat ikut peduli dan mengawasi.

Sari mengatakan, meski sifatnya mirip gunung es yang baru tampak saat kasus mencuat, kekerasan seksual anak bukan berarti tak bisa dicegah. Dengan masyarakat ikut peduli, langkah ini juga menjadi bentuk pencegahan kasus semacam ini kembali terjadi. (ang)

Semoga Ini Kasus Terakhir

KASUS kekerasan seksual dengan korban anak-anak hingga berujung pembunuhan di Tegalrejo, Yogyakarta menjadi sorotan banyak pihak.

Selain dianggap kejahatan luar biasa hingga kepolisian tak segan memberikan ancaman berupa hukuman mati atas perbuatan pelaku, kasus ini juga mengejutkan publik DIY.

Tak hanya karena kejahatan luar

biasa yang dilakukan pelaku, kasus ini juga sulit dideteksi yang bisa terjadi setiap saat dan dimana saja. Kepala BPPM DIY, Wredi Wyandani, berharap, kasus tersebut menjadi yang terakhir di DIY.

Kasus ini diharapkan, mampu membuka kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada anak-anak dan hak-haknya. "Pelindungan anak harus dilakukan secara sinergi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

● ke halaman 11

Semoga Ini Kasus Terakhir

● Sambungan Hal 1

Ita pun setuju kepolisian yang mengajukan tuntutan maksimal atas kasus ini. Namun, menurutnya, hal ini bukan merupakan solusi utama, meski dengan sanksi berat yang diberikan akan mampu memberikan efek jera dan bisa jadi menjadi peringatan bagi calon-calon pelaku.

"Itu pun harus dilaksanakan secara konsisten, dalam arti hukum harus ditegakkan tanpa pandang latar belakang. Jika memang kejahatan

an ini terulang, maka sanksi yang diberikan harus sama. Sehingga dampaknya dapat dirasakan," paparnya.

Wredi berpendapat, pencegahan paling efektif justru berasal dari masyarakat. Yaitu, dengan meningkatkan lagi kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Budaya saling peduli merupakan benteng terkokoh agar kasus semacam ini tak terulang lagi.

"Sebenarnya kepedulian sosial bisa dilakukan dari hal yang paling sederhana, yaitu tegur sapa dengan orang lain, dengan tetangga. Dengan saling tegur sapa, bisa jadi sarana untuk saling mengingatkan dan men-

cegah munculnya niat jahat," ujarnya.

Melalui tegur sapa juga menjadi sarana saling mengawasi. Menilik kasus ini, Wredi mengatakan, kejadian nahas tersebut tak akan terjadi bila ada kepedulian masyarakat.

Terlebih, terjadinya kasus ini di lingkungan padat penduduk, sehingga seharusnya pengawasannya lebih ketat lagi. "Tentu tetangganya tahu jika korban berada di rumah sendiri. Anak sekecil itu harusnya tetangga ikut menjaga. Tapi, yang terjadi komunikasi antartetangga juga kurang. Ini harus bisa menjadi pelajaran bersama," katanya. (ang)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005